



**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH, PEMAHAMAN AKUNTANSI, KETAATAN
PADA PERATURAN PERUNDANGAN DAN PENGENDALIAN
AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

(Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Esha Selvia Ayu Sella
21601082091



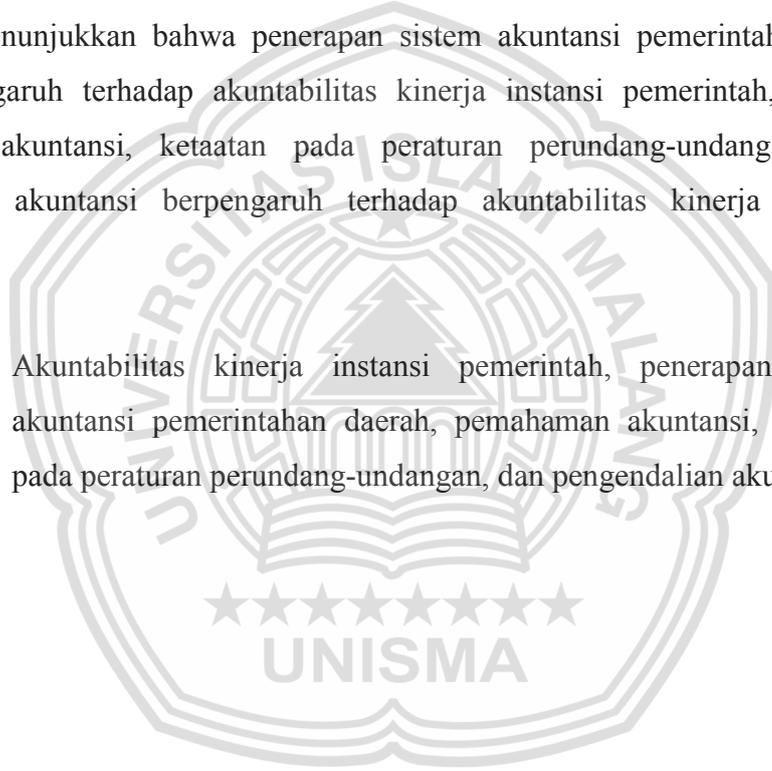
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**

2020

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kota Pasuruan. Sampel yang digunakan sebanyak 71 responden dari 3 instansi pemerintah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Data uji yang digunakan adalah uji hipotesis simultan (f), koefisien determinasi (R^2), dan uji hipotesis parsial (t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

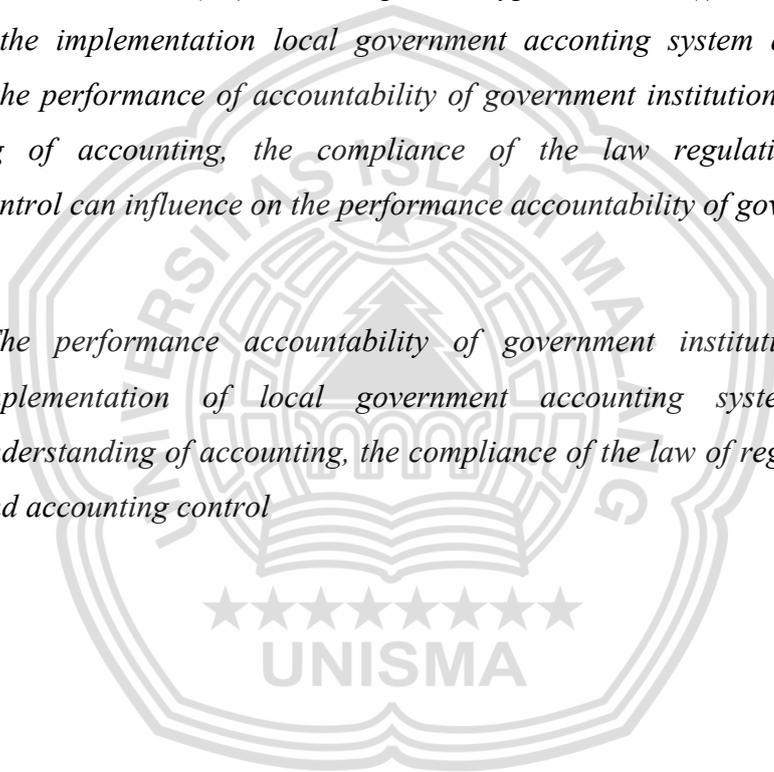
Kata kunci: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan pengendalian akuntansi.



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of implementation local government accounting system, the understanding of accounting, the compliance of the law regulation, and accounting control on the performance accountability of government institution. The population in this study was SKPD of Pasuruan City. The sample use were are 71 respondents from 3 government institution. Data was collected using a questionnaire method. Data analysis method used is multiple regression analysis. The test data used is the simultaneous hypothesis test (f), the coefficient of determination (R²), and the partial hypothesis test (t). The results showed that the implementation local government accounting system does not influence on the performance of accountability of government institution, but the understanding of accounting, the compliance of the law regulation, and accounting control can influence on the performance accountability of government institution.

Keywords: *The performance accountability of government institution, the implementation of local government accounting system, the understanding of accounting, the compliance of the law of regulation, and accounting control*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Adanya otonomi daerah merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki. Maju atau tidaknya suatu daerah akan ditentukan oleh kemampuan dan kemauan dalam mengimplementasikan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam rangka memajukan daerahnya, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada, dan tentu dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan daerah yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah, maka diperlukan sistem akuntansi yang baik yang akan menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban tidak hanya dengan melaporkan keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan yang telah dicapai, namun juga

dengan mengungkapkan kegagalan pelaksanaan program dan kebijakan apabila terjadi.

Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pusat. Kedua, pertanggungjawaban hirozontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan tersebut adalah rangka dalam pemenuhan hak-hak masyarakat, yakni hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban (Halim, 2004).

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistemyang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Dengan demikian reformasi akuntansi pemerintahan

di Indonesia adalah perubahan *single entry menjadi double entry*. *Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan *good public governance*, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian *double entry* dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan *auditable* (Mardiasmo,2006).

Dalam proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. Mardiasmo (2002) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu untuk dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Selain penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan juga merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya hal ini diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi

publik. Akan tetapi kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku masih banyak terjadi di daerah-daerah yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukanketaatan atas peraturan perundangan yang telah berlaku (Riantiarno & Azlina, 2011).

Kusumaningrum (2010), mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulharman (2015) tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada satuan kinerja perangkat daerah Kota Pekanbaru) memperoleh hasil bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota Pekanbaru.

Herawaty (2011), dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Jambi memperlihatkan bahwa secara simultan pengaruh kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Jambi mempunyai pengaruh positif signifikan. Secara parsial variabel yang memiliki pengaruh negatif yaitu variabel kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi, sedangkan variabel yang memiliki pengaruh positif yaitu variabel sistem pelaporan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Janny (2018) yaitu pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Pada SKPD Padang Lawas) dengan menambah satu variabel yaitu pengendalian akuntansi. Penggunaan pengendalian akuntansi sebagai variabel ialah untuk melihat seberapa tinggi tingkat pengendalian akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang unggul, dikarenakan dalam mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, pengendalian dibutuhkan untuk menjauhkan kepentingan yang tidak berorientasi pada tujuan yang akan dicapai, serta digunakan untuk mengambil keputusan sesuai rencana.

Alasan dipilihnya Instansi Pemerintah Kota Pasuruan sebagai lokasi penelitian adalah karena Pemerintah Kota Pasuruan gagal meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur setelah dua tahun

sebelumnya selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Radar Bromo: 27/05/2019), dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018, Pemkot Pasuruan hanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut mengalami penurunan dibandingkan dua tahun anggaran sebelumnya. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di dua tahun saat itu, Pemkot mendapatkan WTP. Berdasarkan siaran pers BPK, terdapat beberapa kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan Pemkot. Sehingga, berdampak terhadap kewajaran atas penyajian LKPD. Di antaranya penatausahaan aset tetap yang belum tertib; pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak tepat; penyajian saldo aset tidak berwujud dan aset lain-lain belum memadai; pemanfaatan aset tanah tanpa pengenaan sewa; serta kekurangan volume atas paket pekerjaan belanja modal. Selain itu, juga realisasi belanja daerah atas kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak dilakukan secara memadai; realisasi belanja yang menggunakan Surat perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung (SP2D LS) tidak tepat; penatausahaan persediaan belum tertib; dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan**

Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Bagaimana penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
3. Bagaimana pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
4. Bagaimana ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
5. Bagaimana pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik. Penelitian ini juga diharapkan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini

diharapkan dapat membantu kinerja instansi pemerintah dalam mencapai akuntabilitas pada pemerintah daerah.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sampel penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan, yaitu BAPENDA, BPKA dan BAPPELITBANGDA. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data melalui SPSS diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Pengendalian Akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Secara parsial variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan variabel Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan dan Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini tidak seluruh SKPD di Kota Pasuruan melainkan hanya 3 SKPD yang meliputi

BAPENDA Kota Pasuruan, BPKA Kota Pasuruan dan BAPPELITBANGDA Kota Pasuruan

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan dan pengendalian akuntansi yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga hasilnya kurang optimal secara statistik yang ditunjukkan oleh nilai *Adj R Square* mencapai 48.9%, sedangkan 51.1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3. Pada penelitian ini metode pengumpulan data hanya melalui kuesioner yang dibagikan kepada SKPD bersangkutan, sehingga memungkinkan adanya bias data dalam mengisi kuesioner

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memperluas lingkup penelitian seperti melakukan penelitian kepada seluruh SKPD yang berada di Kota Pasuruan
2. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan atau menggunakan variabel selain yang digunakan oleh peneliti. Contohnya, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, akuntabilitas keuangan dan kompetensi aparatur pemerintah daerah

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode wawancara guna menjelaskan tujuan dari penelitian kepada responden secara rinci, peneliti juga dapat meningkatkan partisipasi narasumber dimana hasil wawancara dapat digunakan untuk mendukung penjelasan hasil penelitian yang telah dilakukan



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Siti Hartini. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus Pada OPD Pendidikan dan Kebudayaan, OPD Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Sekretariat DPRD). *Skripsi*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- BPKP. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah Edisi Kelima*.
- Fatmala, Juanita. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah). *Skripsi*. Universitas Benkulu.
- Fauzan, Reyhan Hady. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat). *JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017*. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Munivariate Dengan Program SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Cetakan VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hasibuan, Janny Rahmi. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Padang Lawas). *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Herawaty, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal*. Universitas Jambi, Jambi.
- Hery. 2009. *Teori Akuntansi*. Kencana, Jakarta.
- Kusumanungrum, Indraswari. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap AKIP Provinsi Jateng. *Tesis*. Program Pasca Sarjana UNDIP, Semarang.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Lumenta, A. L., J, Morasa., L, Mawikere. 2016. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan).

- Jurnal EMBA*. Vol. 4 No. 2 Juni 2016, Hal. 768-777. Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Media Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muslimin. 2007. *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Pengendalian Perilaku dan Pengendalian Personel Terhadap Kinerja Manajerial PT Berkah Agung Jaya Abadi (Gresik)*. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 5, No. 3.
- Nordiawan, Deddi., dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Pamungkas, Bambang. 2005. *Pengaruh Kualitas Peraturan Perundang-undangan, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, dan Penerapan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Disertasi*. Unpad. Bandung. Tidak Dipublikasikan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Radarbromo.jawapos.com. (2019, 27 Mei). *Pemkot Pasuruan Gagal Pertahankan WTP, Ini Penyebabnya*. Diakses pada 14 Desember 2019, dari <https://radarbromo.jawapos.com/2019/05/27/pemkot-pasuruan-gagal-pertahankan-wtp-ini-penyebabnya/>
- Riantiarno, Reynaldi dan Nur Azlina. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada SKPD Kab. Rokan Hulu)*. *Skripsi*. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soleman, Rusman. 2007. *Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. *Disertasi*. Unpad.

- Soleman, Risky, Rusman Soleman dan Zainuddin. 2019. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal*. Universitas Khairun.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati, Desmiyawati dan R. Adri Satriawan. 2012. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak). *Jurnal*. Universitas Riau.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan (Edisi III)*. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Wahid, Imam. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam). *JOM Fekon*, Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Zulharman, Khodri. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, & Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Kota Pekanbaru). *Skripsi*. Universitas Riau, Pekanbaru.